

AJARAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM MEMERANGI KASUS KORUPSI DI INDONESIA DEMI MENCAPAI BANGSA YANG SEJAHTERAH

Bernadino Dadu Open¹, Damianus Lesu Kedang², Idelfonsius Datung³, Seferinus Gejang⁴

andinoopen@gmail.com¹, damyankedang4@gmail.com², ondatung111703@gmail.com³,
saffgejang@gmail.com⁴

IFTK Ledalero

ABSTRAK

Korupsi; tindakan yang merusak tatanan negara dan memberikan kesan negatif dalam penilaian rakyat terhadap pemerintah. Kasus korupsi di Indonesia selalu terjadi, bahkan menjadi suatu kebiasaan yang selalu terulang terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan apa itu korupsi, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan kasus korupsi di negara Indonesia dan (3) menjelaskan tentang bagaimana peran agama Islam dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, negara Indonesia selalu dihebohkan dengan berita-berita di berbagai media yang isinya tentang kasus korupsi. Kasus ini seakan sudah membudaya di negara Indonesia. Berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, tidak cukup untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di negara ini. Malahan para pelaku mendapatkan suatu pembelaan yang berujung pada kebebasan. Negara seakan membuka suatu peluang sehingga kasus korupsi terus terulang. Hal inilah, hemat penulis, menjadi suatu masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, penulis memberikan suatu solusi untuk memerangi kasus korupsi di negara Indonesia yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam. Dalam penulisan ini juga, dicantumkan suatu tawaran agar mendorong lahirnya pemimpin yang baik dari perspektif Islam itu sendiri. Tujuan dari penulisan ini adalah agar mencegah terulangnya kasus korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini dibuat dengan menggunakan metode kepustakaan. Dengan itu, penulis dimudahkan dalam proses pengumpulan data sebagai penyokong setiap argumentasi yang dibangun. Penulis mengelaborasi pelbagai data yang terkumpul dalam bagian pembahasan. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat membaca artikel ini secara intensif.

Kata Kunci: Agama, Bangsa Indonesia, Korupsi, Sejahtera.

ABSTRACT

Corruption; actions that damage the state order and give a negative impression in the people's assessment of the government. Corruption cases in Indonesia always occur, and have even become a habit that is repeated over and over again. This research aims to (1) describe and explain what corruption is, (2) describe and explain corruption cases in Indonesia and (3) explain the role of Islam in fighting corruption cases in Indonesia. In the last few years, Indonesia has always been shocked by news in various media containing corruption cases. This case seems to have become a culture in Indonesia. The various regulations that have been established are not enough to eradicate criminal acts of corruption in this country. Instead, the perpetrators received a defense that led to freedom. The state seems to be opening up an opportunity so that corruption cases continue to recur. How could it not be, the perpetrators who should have been punished, were instead defended to the death. This, in the author's opinion, is a problem that must be overcome. Therefore, the author provides a solution to combat corruption cases in Indonesia which is based on the teachings of the Islamic religion. In this writing, there is also an offer to encourage the birth of good leaders from the perspective of Islam itself. The aim of this writing is to prevent the recurrence of corruption cases in Indonesia. This article was written using the bibliography method. With this, it is easier for the writer to collect data to support each argument that is built. The author elaborates on the various data collected in the discussion section. Therefore, the author hopes that readers can read this article intensively.

Keywords: Religion, Indonesian Nation, Corruption, Welfare.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terkenal dengan keberagamannya yang unik. Begitu banyak perbedaan yang dimiliki oleh setiap daerah dari Sabang sampai Marauke. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing yang berbeda dengan daerah lain. Mulai dari bahasa, ras, adat-istiadat, agama, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah. Dari setiap aspek kehidupan membuat setiap orang menjadi semakin berjarak. Semuanya amat terasa jelas, apalagi dalam bingkai perkembangan jaman yang semakin modern saat ini, mengakibatkan semua orang cenderung mementingkan diri sendiri.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia berhadapan dengan berbagai permasalahan. Masalah-masalah yang muncul bersumber dari berbagai aspek kehidupan seperti, aspek sosial, budaya, bahkan yang paling mencolok adalah permasalahan di bidang politik. Masalah politik yang sering terjadi di negara Indonesia adalah keseringan menyalahgunakan kekuasaan dan berakhir dengan tindakan korupsi. Kasus korupsi di Indonesia menjadi salah satu masalah yang hangat untuk selalu diperbincangkan. Hampir setiap hari kasus ini muncul di berbagai media, dan menjadi salah satu berita yang aktual.

Kasus korupsi dinilai sangat merugikan, apalagi korupsi dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena sekian banyak orang memanfaatkan jabatannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang diperoleh, maka semakin memberi peluang untuk bertindak secara bebas. Sikap individualistis akan menjadi suatu acuan untuk mencapai kesejahteraan pribadi. Tanpa berpikir panjang, hal yang tidak diinginkan pun akan dilakukan. Inilah yang menyebabkan kasus korupsi sering terjadi, karena adanya suatu keinginan untuk mencapai kesenangan semata.

Berbagai cara sudah diupayakan untuk mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang terus menerus. Berbagai peraturan ditetapkan agar bisa mengatur tatanan kehidupan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Peraturan-peraturan tersebut disertakan dengan hukuman yang setimpal dengan level pelanggarannya. Namun, negara Indonesia tidak pernah lepas dari kasus korupsi, bahkan setiap tahun selalu ada kasus korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, negara harus keluar dari zona nyamannya, serta harus membuat suatu pertimbangan baru dengan membuka peluang untuk memberikan kesempatan kepada peran agama untuk turut mengatasi kasus korupsi ini.

Jika dilihat secara saksama, sepertinya negara ini membuka peluang untuk memberikan setiap orang melakukan tindakan korupsi secara bebas. Bagaimana tidak, kasus korupsi di negara ini selalu saja terjadi. Hal ini terjadi bukan karena peraturan pemberantasan korupsi yang lemah, melainkan tidak ada kesadaran dalam diri pribadi untuk membedakan yang baik dan yang buruk, tidak tau membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Oleh karena itu, penulis mengangkat satu judul yaitu **UPAYA ISLAM DALAM MEMERANGI KASUS KORUPSI DI INDONESIA DEMI MENCAPAI BANGSA YANG SEJAHTERAH**. Dalam tulisan ini, akan dibahas suatu usaha atau upaya agar bisa mencegah kasus korupsi di Indonesia dan ditinjau dari perspektif agama, khususnya ajaran agama Islam, serta satu upaya untuk mendorong lahirnya pemimpin yang berjiwa kemanusiaan.

METODOLOGI

Dalam penulisan karya ini, penulis hanya menggunakan metode penelitian keepustakaan. Dalam metode ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari dan membaca, serta mendalami literatur-literatur tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan

dengan suatu usaha untuk memerangi kasus korupsi, terkhususnya di negara Indonesia. Penulis sangat yakin bahwa telah membaca dan mengolah semua literatur yang ada dan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Di Indonesia

Islam merupakan salah satu agama besar di dunia. Dalam sejarahnya, Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad yang mendapatkan Wahyu secara langsung dari Allah. Dengan kata lain, Islam merupakan agama yang diterima dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun penamaannya bukan hasil ijtihad atau hasil oleh pikir pribadi Muhammad sendiri (Tule 2008). Allah memberikannya secara langsung kepada Muhammad, seperti yang ditegaskan dalam Quran: “Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kukukupkan kepadamu ni’matku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.5,3). Muhammad hanya sebagai perantara Allah di dunia.

Sama halnya dengan agama-agama lain, Islam sendiri bukanlah agama asli orang Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia ini, bangsa yang menghuni lebih dari 17 ribu pulau besar maupun kecil ini telah memiliki keyakinan di daerahnya masing-masing, yang dikenal dengan Animisme dan Dinamisme (Qomar 2021). Berdasarkan catatan sejarah bisa dikatakan bahwa, agama-agama yang dianut oleh negara Indonesia saat ini, adalah agama-agama impor yang dibawah oleh para pedagang. Hindu, masuk dan berkembang lewat kerajaan Kutai dan meluas pada masa kejayaan Majapahit. Buddha, tersebar luas pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Agama Kristen, masuk dan berkembang melalui daerah timur. Begitu pun dengan agama Islam yang berkempang pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan berkembang pesat sampai saat ini.

Saat ini, agama Islam menjadi agama mayoritas negara Indonesia. Hampir di setiap daerah dihuni oleh umat beragama Islam. Hal yang memudahkan umat Islam percaya kepada ajarannya, adalah karena Islam menganggap hanya ada satu Tuhan yang patut disembah. Doktrin tauhid yang dianut agama Islam tercantum dalam sebuah ayat yaitu, La ilaha illallah yang berarti “tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah (Qomar 2021). Hampir seluruh umat Islam di Indonesia mengenal akan doktrin tauhid ini. Doktrin ini menjadi suatu hal yang mandarah daging bagi kaum muslim, karena dianggap penting dan telah ditanamkan dalam diri masing-masing. Setiap umat Muslim mengenal doktrin ini melalui pengajaran di sekolah, pengajaran di tempat pengajian, pesantren, khotbah jum’at, dan dimana pun doktrin ini selalu menggema di telinga para penganut Islam, terutama di Indonesia.

Islam di Indonesia bukan hanya sekedar agama yang diyakini. Islam Indonesia berkontribusi terhadap kehidupan sosial yang nyaman dan toleransi yang tinggi. Semua dimensi Islam Indonesia baik akidah (kalam), fiqh, tasawuf, politik Islam, pendidikan Islam maupun budaya Islam ternyata berimplikasi pada pembentukan keberagaman Islam yang ramah (Qomar 2021). Namun, Islam pun tidak luput dari tuduhan atas kekerasan yang terjadi. Beberapa tahun terakhir berbagai kasus terjadi di tanah air Indonesia seperti pengeboman, pembunuhan dan penyanderaan, semuanya diatasnamakan Islam sebagai pelakunya. Tuduhan selanjutnya yang muncul adalah bahwa Islam mengajarkan kekerasan, bahkan pertumpahan darah. Semua tuduhan ini tidak benar adanya, karena bukan itulah yang diajarkan oleh Islam. Islam merupakan agama damai sebagai identitasnya. Islam justru mengajarkan kedamaian, keterbukaan, toleransi, kerukunan, dan keharmonisan (Qomar 2021).

Islam Dan Negara

Islam dan negara merupakan dua Institusi yang berbeda. Islam sebagai agama lebih kepada ajaran tentang keyakinan, sedangkan negara mengurus keseluruhan bidang dalam kepentingan rakyat. Jika dibandingkan, keduanya tidak mempunyai titik temu. Seperti halnya bahwa agama tidak bisa mengganggu urusan politik, begitupun sebaliknya. Agama tidak mempunyai wewenang dalam mengurus urusan negara. Bagaimana mungkin agama mengambil alih urusan kenegaraan jika ajarannya hanya seputaran cinta kasih dan memaafkan yang berbuat salah.

Berkaitan dengan urusan kenegaraan, ada hal yang tidak bisa diganggu gugat oleh agama. Agama bertolak pada hukum cinta kasih, dan negara tidak selamanya terpaku pada hukum tersebut. Negara ibarat penjaga malam yang menertibkan, menjajah dan mengantisipasi penganiayaan, perjudian, pelacuran, seolah negara ikut serta dalam berbagai persoalan warganya (Syafie 2019). Bahkan negara juga bisa mengambil suatu keputusan pada level yang lebih tinggi yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, yaitu negara bisa menyatakan perang dengan negara lain. Hal seperti itu sangat bertentangan dengan agama, sebab agama hanya mengajarkan caranya melindungi dan melayani, serta memaafkan.

Negara yang memiliki pemerintahan tersendiri dan kewajiban untuk mengurus semua masyarakat yang ada di dalamnya, bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi dalam urusan politik untuk mensejahterakan seluruh umat manusia, harus dijalankan dengan benar sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dengan demikian, negara tidak bisa menyepelkan peran agama. Ajaran agama hanya terbatas pada kehidupan personal dengan tujuan hidup baik terhadap yang Maha Kuasa. Agama tidak bisa mengatur urusan kenegaraan yang melibatkan seluruh masyarakat. Namun, agama menjadi titik tolak bagaimana membentuk suatu negara dengan kepemimpinan yang bermoral dan berjiwa sosial.

Di negara Indonesia, hubungan antara agama dan negara terlihat jelas dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila sebagai dasar negara dianggap telah merepresentasikan bentuk hubungan paling ideal antara agama dan negara (Muhammad 2020). Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menjadi titik tolak untuk keduanya agar bisa menjalin kerja sama untuk membentuk negara ini. Bagi umat Islam, penduduk mayoritas negara ini, Pancasila dan UUD 1954 adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan agama. Keduanya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang dibutuhkan, bukan hanya oleh bangsa Indonesia, melainkan juga oleh dunia kemanusiaan (Muhammad 2020).

Islam tidak menuntut negara agar menjadi negara yang islami, tetapi Islam menginginkan agar negara menjalankan tugas kenegaraan secara tanggung jawab. Agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia diperjuangkan agar mendapat tempat khusus di dalam sistem pemerintahan Indonesia (Tetik 2023). Dalam proses ini, negara tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan agama. Islam mengajarkan bahwa, agama dan negara adalah dua institusi yang saling membutuhkan bagi eksistensi negara bangsa. Negara sebagai tubuh dan agama sebagai ruhnya (Muhammad 2020). Dalam hal ini, negara dianggap sebagai suatu badan di dunia untuk menghidupi apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa.

Kesejahteraan adalah impian semua orang, dan tentu saja menjadi impian suatu bangsa. Untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu bangsa yang besar bukanlah hal yang mudah. Apalagi bangsa yang majemuk dengan segala keberagamannya yang unik. Oleh karena itu, suatu negara membutuhkan pemimpin yang bijaksana untuk memerintah serta menghantarkan rakyatnya menuju cita-cita yang diinginkan. Namun, apakah dengan adanya

pemerintah, suatu bangsa bisa mencapai tujuan tersebut. Tentu saja “iya” dan bisa saja “tidak”. Menjadi pemimpin memang mudah, tetapi menjadi pemimpin yang baik tidak semua orang bisa menjalankannya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang unik dalam urusan kepemimpinannya dengan berpegang pada sistem pemerintahan Demokrasi. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik (Bagus 2000). Indonesia adalah salah satu negara yang menginginkan agar kekuasaan dan pemerintah diambil alih oleh rakyat sendiri. Dalam melakukan pemilihan kepemimpinan, Indonesia menerapkan suatu sistem yaitu pemilu (pemilihan umum). Masyarakat berhak memilih pemimpin secara bebas secara langsung, tanpa tekanan dari pihak manapun, tetapi dilakukan secara rahasia.

Meskipun pemerintahan dipegang oleh rakyat, negara Indonesia tetap mempunyai pemimpin yang memegang jabatan tertinggi yang bertugas untuk mengatur. Kepemimpinan di Indonesia sudah diatur secara baik mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Setiap kelompok pemimpin digolongkan dalam lembaganya masing-masing serta menjalankan tugasnya masing-masing. Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, legislatif sebagai perantara suara rakyat dan membuat UU, dan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan pengadilan dan berwenang untuk mengadili. Selain itu, masih ada jabatan-jabatan lain seperti BPK dan KPK, serta lembaga yang bertugas mengatur keamanan, yakni polisi dan tentara.

Seluruh jajaran kepemimpinan tersebut adalah orang-orang yang berasal dari rakyat. Tujuan utamanya adalah mau mewujudkan harapan rakyat. Dengan kata lain, rakyat memilih seorang pemimpin yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin. Oleh karena itu, seorang calon yang berhasil mendapatkan jabatan sebagai pemimpin, hendaklah menjalankan tugasnya dengan baik demi kesejahteraan bersama. Namun, apakah seorang pemimpin yang dipercaya akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik? tentu saja “iya” dan bisa saja “tidak”.

Islam menginginkan seorang pemimpin yang baik dan mampu memimpin dengan bijaksana. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar peraturan negara yang disiarkan ke seluruh dunia dan semata-mata hanya menjalankan hukum keadilan yang menyeimbangkan antara amar ma’ruf dan nahi mungkar (Syafie 2019). Nabi Muhammad sendiri adalah titisan Allah. Dia dipilih secara langsung untuk memimpin umatnya dengan adil seturut kehendak Allah. Dunia saat ini, sangatlah mustahil jika ada pemimpin yang sama seperti Muhammad. Namun, bukan itu yang menjadi persoalannya. Seorang pemimpin hanya perlu menghidupi jiwa kepemimpinan Muhammad dalam dirinya. Seorang pemimpin harus mengambil nilai positif seperti yang dianjurkan oleh agama Islam dalam cermin hidup Muhammad. Dengan demikian, terciptalah suatu kehidupan yang layak bagi masyarakat, yang bertolak dari pemimpin yang bermoral yang mengutamakan keadilan.

Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, posisinya sebagai Rasul Allah yang terakhir tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun, tidak dengan posisinya sebagai kepala negara. Setelah Ia meninggal dunia, para khalifah yang jujur mengambil alih kepemimpinan. Negara yang memiliki pemerintahan harus diisi oleh orang bermoral, bijaksana, berbudi luhur dan cerdas dalam menjalankan hal-hal kenegaraan (Syafie 2019). Dalam ajaran Islam, para rohaniwan lebih cocok menduduki jabatan kenegaraan. Dengan kata lain para rohaniwan menjadi tokoh pemerintah yang mengambil alih urusan kenegaraan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu selain menjadi Nabi dan Rasul Allah sekaligus juga menjadi kepala negara serta kepala

pemerintahan (Syafie 2019).

Di dunia yang semakin modern ini, tidak perlu lagi memilih seorang pemimpin yang berasal dari kaum rohaniwan seperti yang dianjurkan oleh Islam. Semua orang yang ingin mengambil alih suatu jabatan kenegaraan, bebas dari kalangan manapun, asalkan berpendidikan tinggi dan berjiwa kepemimpinan. Tidak perlu lagi seorang pemimpin dari agama manapun, karena semuanya bisa menjabat sebagai pemimpin. Islam sendiri tidak menuntut agar pemimpin harus berasal dari kaum Muslim, Sebab negara Indonesia bukanlah negaranya orang Muslim saja. Namun, para pemimpin harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran Islam agar mencapai suatu bangsa yang sejahtera.

Indonesia juga mempunyai satu jabatan kepemimpinan yang bertugas mengadili, yakni lembaga Yudikatif. Pemegang kekuasaan pengadilan ini, haruslah berlaku jujur, adil dan bijaksana, serta menerapkan keadilan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan yang berwenang memberikan putusan hukuman, haruslah berlaku jujur. Islam mengajarkan agar penegak keadilan tidak bersifat memihak atau membela, apalagi membela yang salah. Islam menganggap salah apabila membela orang yang sudah terbukti salah. Sebab dalam Islam, segala sesuatu yang dirahasiakan tidak akan pernah abadi bagi Allah, karena Allah Mahatahu terhadap segala yang ada.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan terhadap kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan, jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap perkara yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nissa (4): 135).

Kasus Korupsi Di Indonesia

Indonesia sekarang ini dihadapkan dengan berbagai persoalan. Berbagai bidang kehidupan pasti mengalami kejanggalannya dan bahkan menjadi masalah besar yang sulit diselesaikan. Akhir-akhir ini banyak kasus kian menyapa bumi Pertiwi mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus besar, salah satunya adalah kasus korupsi. Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat dari kalangan atas sampai bawah. Setiap hari bangsa Indonesia disuguhi berita-berita di media masa berbagai modus korupsi dan suap-menyuap yang melibatkan para pengambil kebijakan publik-politik, baik pusat maupun daerah (Muhammad 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menjadi satu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang haram untuk kesenangan pribadi seseorang.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* (Chazawi 2016). Hal yang sama dipakai juga oleh Indonesia dengan memakai kata korupsi. Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik...sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Chazawi 2016).

Korupsi dilihat sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan negara, baik menyeluruh ataupun sebagian kecil institusi tertentu. Dalam kacamata masyarakat kecil,

Tindakan Pidana Korupsi sebagai suatu pelanggaran yang paling keji. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan (Chazawi 2016). Pandangan masyarakat tentang korupsi tidak jauh hanya pada sebatas penyalahgunaan uang. Selain itu, seorang yang menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi, akan dicap buruk oleh masyarakat.

Korupsi sesungguhnya mencakup banyak hal. Dalam konteksnya, begitu banyak bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi yang tercatat dalam Undang-undang, antara lain: Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (pasal 2), tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kesenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5), korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (pasal 7), korupsi Pegawai Negri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8), dan masih ada pasal-pasal lain lagi yang membahas macam-macam tindak pidana korupsi tersebut.

Meskipun demikian, dari pandangan masyarakat tentang korupsi ada benarnya juga. Pada kenyataan selama ini, kasus korupsi yang terjadi kebanyakan berkaitan dengan penyalahgunaan uang. Sebab perbuatan korupsi pada intinya adalah perbutan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara (Chazawi 2016). Dengan adanya tindak pidana korupsi, suatu negara bisa kehilangan hartanya. Apalagi jika pidana korupsi yang terjadi memakan kerugian sampai miliaran rupiah, atau bahkan terliunan.

Korupsi menjadi salah satu tindakan pelanggaran hukum yang dinilai sangat merugikan. Tindakan ini sangat tidak berpri kemanusiaan. Bukan hanya negara yang merasakan kerugian, tetapi juga masyarakat kecil. Harta yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, malah digunakan secara semena-mena demi kepentingan individu. Oleh karena itu, patut untuk diperangi atau sekaligus dimusnakan, terutama di tanah air yang tercinta ini, tanah air Indonesia.

Kasus korupsi yang terjadi di tanah air Indonesia, jauh dari kata sering, karena lebih tepatnya adalah selalu. Korupsi di Indonesia saat ini menjadi suatu topik yang sangat meresahkan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus korupsi terbanyak di dunia. Tindakan pidana ini seakan telah menjadi suatu kebudayaan, sehingga terulang terus-menerus. Hampir setiap hari berita-berita di media sosial terisi kasus-kasus korupsi. Sangat memprihatinkan jika kasus ini tidak bisa diatasi dengan tegas untuk memberi peringatan kepada yang lainnya di masa yang akan datang.

Meskipun telah ditetapkan peraturan serta hukuman untuk mengatasi tindak pidana korupsi, negara Indonesia tidak pernah lepas dari kasus-kasus korupsi tersebut. Bagaimana tidak jika peraturan yang ditetapkan seakan diperjual belikan dengan kekuasaan. Siapa yang mempunyai kekuasaan, dia pantas dibela. Ini merupakan salah satu bentuk permainan politik. Para petinggi negara yang berwajib menentukan hukuman pun masih saja bergulat dengan putusannya sendiri. Padahal sudah ada tertera dalam Perpu untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pada akhirnya, banyak yang mendapat hukuman ringan, bahkan dibebaskan.

Benarlah bahwa korupsi di Indonesia seakan sudah membudaya dan menjadi tradisi. Indonesia diibaratkan sebagai surga untuk para koruptor. Tercatat dari penelitian Transparency International pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat ke-5 terkorup dari 146 negara. Menurut Bung Hatta, di era Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya. Jika era sebelumnya yang banyak melakukan korupsi adalah

pemerintah tingkat pusat, era reformasi kini hampir di semua lini (eksekutif, yudikatif, legislatif, dan daerah) terjadi korupsi (Taher 2005).

Upaya Islam Dalam Memerangi Kasus Korupsi Di Indonesia

Bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini, memang sulit dalam urusan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sehingga tidak heran jika banyak yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dengan prinsip bahwa, sebelum mensejahterakan orang lain, terlebih dahulu harus membahagiakan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan ajaran agama, sungguh sangat bertentangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus korupsi di tanah air ini, perlu adanya peran serta agama, salah satunya agama Islam.

Islam bukanlah suatu negara. Di Indonesia, Islam hanya salah satu agama. Islam dengan negara memang bertolak belakang dalam urusan pemerintahan. Indonesia menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat, serta Islam hanya berpegang teguh pada nilai kedaulatan Tuhan. Namun, posisinya lebih berpengaruh dari agama-agama lain, sebab Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, peran Islam sangat dibutuhkan untuk ikut serta membela negara ini dari segala keterpurukannya. Islam beserta ajarannya dalam membentuk suatu negara, memang baik adanya dan sangat bermanfaat. Negara memang mengesampingkan peran Islam dalam urusan politik, namun negara tidak boleh sesekali menolak ajaran Islam dalam menjalankan urusan politik dengan baik.

Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur akidah, ibadah, mu'amalah, dan tasawuf, tetapi Islam juga memiliki ajaran yang berkaitan dengan politik (Qomar 2021). Dari sejarahnya, munculnya Islam bukan hanya membawa ajaran keagamaan, melainkan juga membentuk tatanan politiknya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kisah hidup Nabi Muhammad sendiri, selain menjadi kepala agama, Ia juga menjabat sebagai kepala negara. Alhasil Ia mendirikan suatu negara baru di Medinah dan merintis jalannya pemerintahan.

Ajaran Islam seputar pemerintahan tersirat suatu maksud dan tujuan tertentu. Terutama dalam kaitannya dengan korupsi, Islam tidak sama sekali menghalalkan tindakan keji seperti ini. Menurut Frans Magnis Suseno, "korupsi merupakan bentuk pengkhianatan paling kejam dan tercela terhadap bangsa. Sebab, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kejujuran dasar yang diperlakukan semua orang saat hidup bersama dengan yang lainnya" (Taher 2005). Korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian bagi negara, melainkan juga mengakibatkan kemelaratan kepada rakyat, sehingga fakir miskin semakin tertindas.

Islam konsisten terhadap ajarannya, dan berpegang teguh pada jalan Allah. Dalam korelasinya dengan pemberantasan korupsi, Islam mempunyai tekad yang kuat untuk memerangi korupsi tersebut. Korupsi adalah perbuatan hina dan tentu saja berlawanan dengan perintah Allah. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sama halnya dengan kafir dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan untuk memeranginya, sebab tidak searah dengan jalan Allah.

Berjuang memberantas korupsi harus disepadankan dengan berjuang di jalan Tuhan, mati syahid dimaknai jaminan surga bagi siapapun yang mati karena memberantas korupsi, dan kafir diidentifikasi sebagai pelaku korupsi tersebut (Helmy 2005). Sama seperti perjuangan orang Islam membela imannya akan Allah dengan. Begitu juga dengan berjuang melawan korupsi, yakni dengan jihad di jalan Allah. Jihad artinya rela berkorban untuk melawan yang sesat. Dengan demikian, korupsi pun harus mendapat perlawanan demikian, agar menyadarkan semua orang bahwa betapa buruknya perbuatan hina tersebut, yakni korupsi.

Persaingan politik yang dianjurkan Islam harus didasarkan pada tujuan yang baik demi kesejahteraan bersama. Islam tidak menentang hasrat pribadi untuk memperoleh keuntungan ataupun adanya persaingan ekonomi...Yang dikehendaki Islam amat sederhana, yaitu hasrat untuk memperoleh keuntungan dan nafsu untuk bersaing itu diimbangi oleh kejujuran dan belas kasih (Smith 2008). Oleh karena itu, para pemimpin tidak dianjurkan untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat sesuka hati, apalagi sampai mengambil sesuatu dari milik negara tanpa ijin tertentu. Apalagi dengan maksud demi kesenangan pribadi semata.

Kajian Islam terkait larangan melakukan tindak pidana korupsi, bukan sekedar suatu ajaran belaka. Larangan-larangan untuk tidak melakukan perbuatan hina tersebut, sudah ada secara tertulis dan tidak akan hilang, sehingga Islam berpegang teguh padanya. Sama seperti agama-agama lain yang mempunyai pegangan tersendiri. Misalnya agama Kristen berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci, Weda untuk agama Hindu, Tripitaka bagi agama Buddha, begitupun agama Islam yang berpegang pada ajarannya yang tertuang dalam Alquran. Dalam Alquran, ada tertera ayat-ayat yang melarang perbuatan-perbuatan hina, termasuk korupsi.

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-ḥukkâmi lita'kulû fariqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 188).

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)”. (QS. Al-Nisa (4): 29).

Kedua ayat di atas mau menegaskan bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai harus didapatkan secara adil. ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin harus menghindari sikap egoisme dalam dirinya. Jika sikap tersebut tidak bisa dilawan, maka timbul ketidakadilan yang berujung pada tindak pidana termasuk korupsi. Islam melarang perbuatan batil, yang artinya berbuat kesalahan secara semena-mena karena adanya dorongan hawa nafsu. Hal ini harus ditanamkan dalam-dalam bagi para pejabat agar tidak terjerumus dalam perbuatan batil tersebut. Dengan kata lain, keinginan untuk memiliki barang negara secara tidak adil.

Sama halnya dengan korupsi. Semuanya berawal dari ketidakpuasan terhadap harta milik pribadi, sehingga timbulah keinginan untuk melakukan korupsi. Kecerakahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak negara serta menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya tanamkan sikap keadilan dari pada keegoisan. Sebab memperoleh kekayaan secara adil tidak akan membawa dampak buruk apapun dan tidak merugikan pihak manapun.

was-sâriqu was-sâriqatu faqtha'û aidiyahumâ jazâ'am bimâ kasabâ nakâlam minallâh, wallâhu 'azîzun ḥakîm: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. Al-Maidah (5): 38).

Berbeda dengan dua ayat sebelumnya, ayat ini lebih menekankan akibat yang diperoleh. Korupsi tidak ada bedanya dengan mencuri. Bedanya, koruptor adalah pencuri besar, sedangkan lainnya pencuri kecil. Dikatakan demikian karena korupsi merugikan pihak negara dan seluruh warganya, terutama dari kalangan miskin. Perbuatan hina seperti ini layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Islam mempunyai jalan hukumnya

tersendiri, yakni dengan memotong tangan seperti yang tertuang dalam ayat di atas. Dengan demikian, negarapun harus melakukan hal demikian, atau lebih dari itu.

Hukuman kepada tindak pidana korupsi, seharusnya lebih kejam karena menyangkut penghinaan terhadap citra bangsa. Dikatakan penghinaan karena telah mengecewakan semua pihak yang memberikan kepercayaan atas tugas kepemimpinan. Namun, yang menjadi persoalannya adalah, negara Indonesia sampai saat ini tidak konsisten untuk menghukum para pelaku tindak pidana korupsi. Peraturan terkait hukuman terhadap pelaku korupsi yang sudah ditetapkan, sejauh ini belum dilaksanakan, sehingga kasus korupsi selalu terulang terus-menerus.

Dapat disimpulkan bahwa, kasus korupsi di Indonesia selalu terjadi bukan karena peraturan perundang-undangan yang lemah dalam mengatasi kasus korupsi, melainkan ketidak konsistenan dalam menerapkan peraturan tersebut. Aturan yang sudah ditetapkan telah baik adanya, namun pelaksanaannya belum diterapkan secara tegas. Negara seakan memberikan perlindungan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, sama halnya dengan negara membuka peluang untuk memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk melakukan tindakan korupsi.

KESIMPULAN

Indonesia di era modern ini, begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia. Masalah demi masalah selalu terjadi dan selalu mengiasi hari-hari hidup manusia. Pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, adalah masalah yang selalu terjadi. Di tambah lagi dengan Korupsi semakin meraja lela di mana-mana seakan menjadi suatu budaya baru. Semuanya berawal karena pemerintahan yang kurang tegas akan peraturan yang telah ditetapkan, hingga masalah-masalah yang seharusnya tidak bisa dimaafkan, menjadi masalah yang biasa-biasa saja dan selalu terulang terus-menerus.

Seperti itulah cerminan negara Indonesia saat ini. Dalam dunia politik, banyak pemimpin yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan individu. Adanya keegoisan dalam diri, telah membawa malapetaka bagi sesama. Begitu banyak janji yang diikrarkan oleh para calon pemimpin, namun setelah berhasil mendapatkan jabatannya, semua janji tersebut hilang entah kemana. Dengan jabatan tersebut, tak sedikit dari mereka sibuk mengurus urusan pribadi mereka. Belum lagi kasus korupsi yang terjadi dalam perusahaan swasta yang turut merugikan negara. Tujuan dari perbuatan ini tidak lain karena mereka ingin mencapai kebahagiaan dengan memperkaya diri.

Maraknya korupsi di Indonesia terus meningkat sehingga negara mengalami kerugian cukup besar. Namun, dari semua kasus-kasus yang terjadi hanya sebagian saja yang mendapatkan hukuman yang setimpal, sedangkan yang lain mendapat pengampunan, bahkan dibebaskan. Hal ini terjadi karena adanya penerapan kebijakan dan penegakan hukum yang tidak adil dan tidak transparan. Pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya dihukum mati, di negara ini, pelaku malah dibela sampai mati.

Tidak akan ada kata kesejahteraan bagi bangsa dengan para pemimpin yang tidak punya rasa kemanusiaan dalam dirinya. Akan selalu sia-sia, jika hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Dari sini kita bisa mengetahui, bahwa negara yang berdemokrasi tidak selamanya sejahtera. Namun, harus kita syukuri bahwa masih ada pemimpin yang mau memperhatikan semua rakyatnya dengan baik. Dan inilah yang menjadi harapan bangsa. Bangsa dan negara menginginkan seorang pemimpin yang tidak hanya baik tetapi juga bijaksana, dan yang terutama adalah pemimpin yang berdaulat dan taat pada ajaran Tuhan.

Sama halnya dengan ajaran Islam, seorang pemimpin haruslah beriman dan hidup di jalan Tuhan. Sebab dengan demikian, bisa terhindar dari sikap egois terhadap kekuasaan. Orang yang berpegang teguh pada imannya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena adanya kesadaran akan menanggung dosa. Dalam perspektif Islam, orang yang baik akan memperhatikan sesamanya sebagai manusia dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan sesamanya. Hal ini perlu diperhatikan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. 2000. KAMUS FILSAFAT. 2 ed. Jakarta: PT Gramedia.
- Chazawi, Adami. 2016. HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. 1 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Helmy, Masdar. 2005. "Panggilan Jihad Melawan Korupsi." In JIHAD MELAWAN KORUPSI, diedit oleh Al Soni BL de Rosari HCB Dharmawan, 1 ed., 104. Jakarta: Kompas.
- Muhammad, Husein. 2020. Islam Yang Mencerahkan dan Mencerdaskan. Diedit oleh Yanuar Arifin. 1 ed. Yogyakarta: Ircisod.
- Qomar, Mujamil. 2021. "Moderasi Islam Indonesia." Diedit oleh Rusdianto, 2021.
- Smith, Huston. 2008. Agama-Agama Manusia. 8 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syafie, Inu Kencana. 2019. Negara dan Agama. Diedit oleh Muhamad Amin Abdullah. 1 ed. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Taher, Tarmizi. 2005. "Jihad NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi." In JIHAD MELAWAN KORUPSI, diedit oleh Al Soni BL de Rosari HCB Dharmawan, 1 ed., 109. Jakarta: Kompas.
- Tetik, Dionisius Klau. 2023. "Keritik Terhadap Realitas Politik Identitas Di Indonesia Dalam Terang Teori Identitas Amartya Sen." Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif.
- Tule, Philipus. 2008. Mengenal & Mencintai Muslim & Muslimat. 2 ed. Maumere: Ledalero.